

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terbentuknya pemerintah di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada hakikatnya sebuah keniscayaan, karena kebutuhan masyarakat yang begitu kompleks sehingga membutuhkan sebuah organisasi tunggal, resmi dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala kebutuhan masyarakat tersebut. Pemerintah sendiri diartikan sebagai segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara Ndaraha (1997) dalam (Labolo, 2007), salah satunya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan yang terwujud dengan tersedianya akses air bersih dan sanitasi yang layak. Mengingat pentingnya ketersediaan air bersih bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, maka pemerintah melalui fungsi yang dimilikinya berkewajiban mengatur segala keperluan agar tercipta tata kelola air bersih yang menjamin ketersediaan air bersih yang layak, sehat, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Konstitusi Indonesia mengamanatkan pada Pasal 33 Ayat (3) UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selanjutnya pada Pasal 6 UU No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air “Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan

yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau”. Berdasarkan pada dasar hukum tersebut maka memberikan kejelasan bahwa negara yang dalam hal ini adalah pemerintah bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya air agar tercipta keberlanjutan ketersediaan air bersih di Indonesia.

Sedangkan pengelolaan sumber daya air dipahami sebagai sebuah rangkaian yang sistematis dalam upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Dalam pengelolaan sumber daya air harus dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas: kemanfaatan umum; keterjangkauan; keadilan; keseimbangan; kemandirian; kearifan lokal; wawasan lingkungan; kelestarian; keberlanjutan; keterpaduan dan keserasian; serta transparansi dan akuntabilitas.

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sudah tidak dapat diragukan lagi. Hasil survei sumber daya air terbarukan dunia yang dilakukan oleh Ian Tiseo pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi ke-8 dengan estimasi ketersediaan sumber daya air terbarukan sebesar 2,019 milyar³ (Tiseo, 2022). Meskipun demikian dengan melimpahnya ketersediaan sumber daya air tersebut Indonesia tidak terlepas dari adanya permasalahan kekurangan air. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor terutama jumlah penduduk dan kebutuhan akan air yang semakin meningkat setiap tahunnya. Misalnya Pulau Jawa dengan jumlah penduduk sebesar 154

juta atau sekitar 56% dari keseluruhan penduduk Indonesia, memiliki kebutuhan air sebesar 59% dari total kebutuhan air nasional.

Selanjutnya menurut Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danis Hidayat Sumadilaga dalam wawancaranya menyebutkan bahwa di 514 kabupaten/kota rata-rata ketersediaan air bersih secara nasional adalah sebanyak 72-90% (Tosiani, 2020). Meskipun demikian, kondisi ketersediaan air bersih di setiap daerah memiliki tantangan-tantangan tersendiri, seperti kemudahan akses dan kualitas air yang dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap daerah yang berbeda sehingga memerlukan penanganan yang berbeda.

Tata kelola air yang buruk juga menjadi masalah lainnya yang dihadapi oleh Indonesia. Melemahnya tata kelola air bersih disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara pemangku kepentingan seperti yang terjadi dalam pengelolaan air bersih di Desa Suntenjaya (Rifandini, 2022). Buruknya tata kelola air bersih juga terjadi di Desa Ampelan, Kabupaten Bondowoso yang sampai menimbulkan konflik dan pertukaran-pertukaran diantara Ulu-ulu (Pamong Desa yang khusus mengerjakan bidang pengairan) (Prastika, 2020). Selain itu, ketidakjelasan regulasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah masih menjadi permasalahan lainnya dalam pengelolaan air bersih di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan tidak terdapatnya peraturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang pengelolaan air bersih di setiap daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman dan Yogyakarta (Harjanta, 2023).

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah yang berada di Jawa Tengah dengan topografi wilayah termasuk ke dalam dataran tinggi atau pegunungan. Wilayah Kabupaten Temanggung masih di dalam area lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, letak tersebut berimplikasi pada kualitas kesuburan tanah dan ketersediaan sumber-sumber air bersih yang melimpah. Kabupaten Temanggung dengan jumlah penduduk sekitar 801 ribu memiliki 23 sumber mata air yang jumlah ketersediaannya mencapai 769,5 lt/det yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat (PDAM "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung, 2018).

Tabel 0.1.1
Data Sumber Mata Air yang Dimanfaatkan
PDAM Tirta Agung Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2020

No.	Sumber Mata Air	Kapasitas
1.	Tuk Mulyo	79 lt/det
2.	Sidandang	85 lt/det
3.	Sigetuk	36 lt/det
4.	Tempurung	20 lt/det
5.	Pucung	13 lt/det
6.	Dempel	8 lt/det
7.	Jumpit	135 lt/det
8.	Pikatan	63 lt/det
9.	Sedandang	17 lt/det
10.	Semadu 1&2	35 lt/det
11.	Tuk Bening	40 lt/det
12.	Sigandul	11 lt/det
13.	Sucen	14 lt/det
14.	Tuk Sewu	40 lt/det
15.	Segaran	16 lt/det
16.	Sekoyan	19 lt/det
17.	Sebayan	14 lt/det
18.	Ngasinan	25 lt/det
19.	Bojet	3,5 lt/det
20.	Segedang & Mudal	13 lt/det
21.	Tuk Areng	3 lt/det
22.	Sigandul 2	60 lt/det

No.	Sumber Mata Air	Kapasitas
23.	Sekenci	20 lt/det
Jumlah		769,5 lt/det

Sumber: <http://pdamtemanggung.com>, 2020

Berdasarkan pada tabel tersebut yang menyajikan kapasitas masing-masing sumber mata air, menunjukkan bahwa antar sumber mata air memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Selanjutnya dari setiap kapasitas air yang dimiliki oleh sumber mata air tidak secara keseluruhan dimanfaatkan oleh PDAM Tirta Agung Kabupaten Temanggung. Akan tetapi, sumber mata air tersebut juga dimanfaatkan baik dalam bentuk SPAM atau PAMSIMAS sampai dengan pemanfaatan yang dikelola oleh organisasi yang dibentuk oleh masyarakat. Berikut tabel di bawah ini menyajikan data kapasitas air yang dimanfaatkan oleh PDAM Tirta Agung Kabupaten Temanggung pada tahun 2018, 2019, dan 2020.

Tabel 1.0.2
Data Sumber Mata Air yang Dimanfaatkan
PDAM Tirta Agung Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Laporan Tahunan 2018-2020

No.	Sumber Mata Air	Wilayah Distribusi	Kapasitas Tahun 2018	Kapasitas Tahun 2019	Kapasitas Tahun 2020
1.	Tuk Mulyo	Temanggung	55 lt/det	55 lt/det	55 lt/det
2.	Tuk Sewu	Temanggung	40 lt/det	40 lt/det	40 lt/det
3.	Segaran	Temanggung	16 lt/det	16 lt/det	16 lt/det
4.	Sigandul II	Temanggung	40 lt/det	40 lt/det	40 lt/det
5.	Sidandang	Temanggung dan Parakan	64 lt/det	64 lt/det	64 lt/det
6.	Sigandul I	Parakan	11 lt/det	11 lt/det	11 lt/det
7.	Jumprit	Parakan dan Ngadirejo	60 lt/det	60 lt/det	60 lt/det
8.	Tuk Bening	Pringsurat	30 lt/det	30 lt/det	30 lt/det
9.	Pucung	Pringsurat	15 lt/det	15 lt/det	15 lt/det
10.	Ngasinan	Pringsurat	21 lt/det	21 lt/det	21 lt/det

No.	Sumber Mata Air	Wilayah Distribusi	Kapasitas Tahun 2018	Kapasitas Tahun 2019	Kapasitas Tahun 2020
11.	Tempurung	Ngadirejo	12 lt/det	12 lt/det	12 lt/det
12.	Tuk Areng	Ngadirejo	3 lt/det	3 lt/det	3 lt/det
13.	Sigetuk	Jumo	15 lt/det	24 lt/det	24 lt/det
14.	Semadu I & II	Kedu	31 lt/det	31 lt/det	31 lt/det
15.	Sucen	Kedu	11 lt/det	14 lt/det	11 lt/det
16.	Sekoyan	Kedu dan Kandangan	12 lt/det	16 lt/det	13 lt/det
17.	Sebayan	Kedu dan Kandangan	7 lt/det	14 lt/det	17 lt/det
18.	Dempel	Kaloran	8 lt/det	8 lt/det	8 lt/det
19.	Sedandang	Tembarak	17 lt/det	17 lt/det	17 lt/det
20.	Pikatan	Kranggan	32 lt/det	32 lt/det	32 lt/det
21.	Segedang	Kranggan	10 lt/det	10 lt/det	10 lt/det
22.	Bojet	Kandangan	4 lt/det	4 lt/det	3 lt/det
23.	Sekenci	Parakan	-	-	20 lt/det
Jumlah			507 lt/det	537 lt/det	553 lt/det

Sumber: <http://pdamtemanggung.com>, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa kapasitas air yang dimanfaatkan PDAM Tirta Agung Kabupaten Temanggung dari tahun 2018-2020 secara umum tidak mengalami peningkatan yang cukup banyak. Dengan kata lain, sumber mata air yang dimiliki Kabupaten Temanggung untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekitar 860 ribu penduduk terbilang sudah mencukupi. Akan tetapi bukan berarti permasalahan air bersih di Kabupaten Temanggung dikatakan tidak ada sama sekali. Beberapa permasalahan seperti kekeringan, jarak sumber mata air yang jauh masih di temui di beberapa daerah di Kabupaten Temanggung, serta masalah ketidakjelasan regulasi yang hanya memiliki Perda No. 2 Tahun 2020 tentang PUMDAM (Perusahaan Umum Daerah Air Minum) Tirta Agung tanpa adanya perda lainnya yang mengatur

secara komprehensif tentang pengelolaan air bersih di Kabupaten Temanggung.

Diantara sumber-sumber mata air di Kabupaten Temanggung yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat terdapat mata air Umbul Jumprit yang terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo. Sumber mata air ini cukup unik dilihat dari segi kapasitas airnya yang paling besar diantara mata air lainnya, serta faktor sejarah yang dimiliki oleh mata air Umbul Jumprit. Berdasarkan pada laporan tahunan PDAM Kabupaten Temanggung, mata air Umbul Jumprit memiliki kapasitas debit air sebesar 135 l/debit. Selain itu, Umbul Jumprit merupakan hulu Sungai Progo yang airnya dianggap suci oleh umat Budha yang setiap hari raya waisak diambil airnya untuk dibawa ke Candi Mendut dan Candi Borobudur. Berdasarkan pada pola tata ruang wilayah Kabupaten Temanggung, Umbul Jumprit masih berada di kawasan lindung dan kawasan hutan produksi yang pengawasannya langsung di bawah Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara.

Air yang ada di Umbul Jumprit selain digunakan dalam kegiatan agama juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengguna manfaat air bersih Umbul Jumprit tersebut adalah 3 desa di Kecamatan Candiroto (Canggal, Mento, Kentengsari) dan 6 desa di Kecamatan Ngadirejo (Tegalrejo, Giripurno, Katekan, Ngaren, Ngadirejo, dan Mangunsari). Di balik melimpahnya kapasitas air bersih Umbul Jumprit, penulis mengidentifikasi bahwa terdapat

beberapa permasalahan dalam pengelolaan air bersih di Umbul Jumprit. Permasalahan tersebut diantaranya: tidak adanya peraturan atau regulasi yang mengatur tentang pengelolaan air bersih di Umbul Jumprit yang dilakukan oleh kelompok pengelola swadaya masyarakat; keluhan masyarakat atas tata kelola air buruk yang menyebabkan akses air bersih yang terhambat, karena respon pengelola dalam mengatasi masalah tidak secepat respon PDAM Tirta Agung Kabupaten Temanggung; serta adanya ketidakadilan dalam mengakses air bersih yang disebabkan oleh adanya hubungan saling menguntungkan antara pihak di luar Perum Perhutani dengan masyarakat yang menginginkan lancarnya akses air bersih.

Diantara 9 desa yang memanfaatkan Umbul Jumprit sebagai sumber air bersih, terdapat 3 desa yang memiliki karakteristik berbeda dalam mengelola air bersih Umbul Jumprit untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Tegalrejo merupakan desa dimana Umbul Jumprit berada, di Tegalrejo pengelolaan air bersih dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat yang berbeda. Sedangkan di Desa Katekan pengelolaan air bersih yang bersumber dari Umbul Jumprit dilakukan oleh Pemerintah Desa setempat. Seperti halnya di Desa Katekan, Desa Mangunsari pengelolaan air bersih dijadikan sebagai BUMDES dengan sumber-sumber air yang beragam.

Problematika tata kelola air bersih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Karena terjaminnya keberlangsungan ketersediaan air bersih bagi masyarakat dapat terwujud dengan adanya tata kelola air yang baik. Berdasarkan pada urgensi yang telah

disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam atas problematika tata kelola air di Umbul Jumprit, serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam membantu pengembangan kebijakan dan strategi untuk pemangku kepentingan dalam mengelola Umbul Jumprit sebagai sumber air baku yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika tata kelola air yang terjadi di sumber mata air Umbul Jumprit?
2. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi problematika tata kelola air tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana problematika tata kelola air yang terjadi di Umbul Jumprit.
- b. Untuk menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi problematika tata kelola air di Umbul Jumprit.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Sosial dan Politik, terkhususnya yang berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan masukan kepada instansi-instansi terkait dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber mata air demi terjaminnya ketersediaan air baku yang layak dan berkelanjutan.

1.5 Penelitian Terdahulu

- a. Claudia Pahl-Wostl, dkk (2020), "Enchancing the Capacity of Water Governance to Deal with Complex Management Challenges: A Framework of Analysis".

Jurnal penelitian ini membahas mengenai kerangka konseptual yang komprehensif untuk mengatasi tantangan koordinasi yang kompleks dalam tata kelola air menggunakan pendekatan STEER (*Strengthening Territorial Enviromental and Economic Resillience*). Pendekatan STEER merupakan diagnostik transdisipliner yang menggabungkan analisis komparatif dengan pendekatan partisipatif yang berorientasi pada solusi untuk mendukung perubahan yang transformatif. Kerangka konseptual STEER memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap karakteristik sistem tata kelola dan manajemen, serta sejauh mana kinerja

dan hubungan diantara keduanya dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya pada kerangka konseptual STEER tersebut sistem tata kelola dan pengelolaan air dilihat sebagai gabungan dari unsur-unsur politik, sosial, ekonomi, administratif, serta elemen institusi dan aktor termasuk interaksinya yang saling berhubungan dalam menjalankan fungsinya pada tata kelola air.

Penelitian ini menghasilkan sebuah penemuan bahwa pendekatan STEER juga dapat memberikan kontribusi berharga dalam IWRM (*Integrated Water Resources Management*) yang ditargetkan SDG's 6.5 dengan menawarkan strategi yang tepat untuk menilai kesenjangan dan analisis tindakan perbaikan. Karena, kerangka STEER berfokus pada hasil-hasil yang berkaitan dengan realisasi koordinasi dan kerja sama, serta pembelajaran sosial dan penyelesaian konflik. Meskipun demikian, kerangka STEER ini bergantung pada desentralisasi (otonomi pemerintahan di berbagai tingkat) untuk mempengaruhi efektifitas pelaksanaan proses koordinasi.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek, tujuan, teori, serta fokus penelitian. Penelitian terdahulu ini memiliki fokus dan tujuan dalam membuktikan kerangka STEER yang pengaplikasiannya cukup dapat memberikan kontribusi dalam tata kelola air. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada analisis yang menjelaskan bagaimana Perum

Perhutani KPH Kedu Utara mengelola Umbul Jumprit menggunakan teori manajemen dan *water governance*.

- b. Fenita Enggraini (2021), “Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha”.

Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran penulis bahwa terdapat tantangan pengelolaan air terletak pada sifat-sifat hidrologis yang tidak dapat dipaksa untuk mengikuti batasan administratif pemerintahan. Sehingga diperlukan adanya tata kelola air yang terintegrasi dan adaptif dengan mengelaborasi implementasi *adaptive water governance* pada proyek KPBU SPAM Semarang Barat (Enggraini, 2021). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik *Social Network Analysis* (SNA) untuk analisis sasaran pertama dan analisis *Delphi* untuk sasaran kedua dan ketiga. Data untuk SNA diperoleh melalui wawancara dan pengumpulan data analisis *Delphi* dilakukan melalui pengisian angket.

Disimpulkan bahwa pada pengaplikasian tata kelola adaptif pada implementasi PPP (*Public Privat Praternship*) menjadi usaha yang tepat untuk memperbaiki penyediaan layanan air minum dengan beberapa temuan diantaranya: regulasi responsif yang mendukung asas desentralisasi, keberadaan lembaga dengan fungsi koordinator, serta kapasitas PJPK (Penanggung Jawab Proyek Bersama) dalam membangun jejaring dinamis. Disisi lain terdapat penemuan dalam aspek tata kelola

yang memerlukan perbaikan yaitu: belum optimalnya fungsi PPP Unit dan kemudahan akses terhadap informasi dan laporan perkembangan proyek. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian, fokus penelitian, dan teori.

- c. Rahmalia Rifandini (2022), “Kebijakan Inovatif Tata Kelola Air Bersih Desa melalui Dinamika Tipologi Kelembagaan”.

Penelitian ini membahas tentang sistem pengelolaan air bersih di Desa Suntenjaya yang berada di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai Cikapundung Kabupaten Bandung Barat. Tipologi Helmke-Levitsky diadaptasi untuk menjabarkan tentang lembaga informal yang memiliki peran tidak kalah penting dengan lembaga formal (Rifandini, 2022). Melalui kerangka *new institutionalism in economic sociology*, serta menggunakan pengaplikasian *software digital* dalam proses coding wawancara penulis menemukan bahwa sistem pengelolaan air bersih di Desa Suntenjaya diambil alih perannya oleh lembaga informal lokal yang selanjutnya disebut dengan ulu-ulu untuk mengelola air bersih desa berdasarkan hak asal-usul desa karena lemahnya kapasitas lembaga formal desa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak di metode penelitian, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan menyajikan gambaran suatu fenomena secara deskriptif. Sedangkan perbedaannya terlihat jelas pada objek, tujuan, serta teori yang akan digunakan. Jika penelitian ini objek penelitiannya adalah sistem

pengelolaan air bersih di Desa Suntenjaya, maka objek penelitian yang akan dilakukan adalah pengelolaan Umbul Jumprit yang terletak di Desa Tegalrejo dengan menggunakan teori manajemen dan *water governance*.

- d. Yhurika Prastika dan Hary Yuswadi (2020), “Pertukaran Sosial: Studi Tentang Tata Kelola Air Bersih di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso”.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan temuan penelitian Rahmalia Rifandini yang menunjukkan bahwa terdapat peran lembaga informal lokal yaitu ulu-ulu dalam mempengaruhi sistem pengelolaan air bersih. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dengan teknik *purposive* untuk menentukan informan yang terlibat langsung dan memiliki pengalaman dalam tata kelola air di Desa Ampelan minimal 2 tahun. Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta penggunaan model interaktif Miles dan Huberman untuk menganalisis data. Serta menggunakan teori pertukaran sosial milik George C. Homans sebagai acuan untuk menganalisis fakta-fakta yang ditemui di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola air di Desa Ampelan merupakan ulu-ulu yang tergabung dalam wadah organisasi HIPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum). Selain itu, ditemukan kelemahan dalam tata kelola air ini seperti ketidakjelasan dalam rekrutmen pengurus, struktur organisasi, dan pembagian keuntungan. Hal tersebut menjadikan tata kelola air di Desa Ampelan dijadikan sebagai

komoditas yang memunculkan konflik dan pertukaran-pertukaran antara ulu-ulu dan konsumen.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode penelitian terutama penggunaan model analisis data Miles dan Huberman, serta penemuan penelitian yang menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola air terutama terletak pada pengelola air, yang mana temuan tersebut juga menjadi masalah yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek, fokus, dan teori yang akan digunakan dalam menjabarkan bagaimana pengelolaan Umbul Jumprit oleh Perum Perhutani KPH Kedu Utara yang digunakan sebagai sumber air baku masyarakat Kecamatan Ngadirejo.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Water Governance

1.6.2.1 Konsep Water Governance

The Global Water Partnership (GWP) merupakan organisasi internasional yang berdiri pada tahun 1996 dengan fokus utamanya pada pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di seluruh dunia. Organisasi berupaya membangun kolaborasi diantara pemangku kepentingan dalam mengatasi masalah tantangan air di seluruh dunia. Sehingga melalui kolaborasi tersebut diharapkan mampu membantu menciptakan kebijakan-

kebijakan pengelolaan sumber daya air yang efektif dan berkelanjutan.

Definisi *water governance* pada dasarnya tidak memiliki penjelasan khusus dari berbagai lembaga yang menangani terkait sumber daya air (Biswas, 2010). Akan tetapi, definisi *water governance* yang dipaparkan oleh The Global Water Partnership dapat digunakan sebagai deskripsi umum untuk menjabarkan terkait pengelolaan sumber daya air.

“The range of political, social, economic and administrative systems that are in place to develop and manage water resources, and the delivery of water services, at different levels of society” (Peter, 2003).

“Gabungan dari sistem politik, sosial, ekonomi, dan administrasi, yang mana sistem-sistem tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya air, serta menyalurkan layanan air diberbagai tingkatan masyarakat”.

Di sisi lain The UNDP Water Governance Facility mendefinisikan *water governance* secara lebih bernuansa dan konkrit dengan menekankan pada adanya peran dan tanggung jawab dari masing-masing pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya dan layanan air.

“Clarification of the roles of government, civil society and the private sector and their responsibilities regarding ownership, management and administration of water resources and services” (Araral, 2013)

“Penjabaran peran dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Penjabaran peran tersebut juga termasuk tanggung jawab mereka atas kepemilikan, pengelolaan, administrasi, serta jasa layanan sumber daya air.”

Sejalan dengan penjabaran definisi *water governance* yang telah dijelaskan sebelumnya, OECD (The Organisation for Economis Co-operation and Development) menjabarkan bahwa adanya *water governance* memberikan kontribusi besar terhadap peran serta pemangku kepentingan dalam perancangan dan implementasi kebijakan. Sehingga dari kerjasama tersebut diharapkan dapat mewujudkan *good water governance* yang memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan (OECD, 2015).

Teori *water governance* terbentuk berdasarkan pada pemikiran bahwa air memiliki karakteristik hidrologi tersendiri yang membutuhkan adanya kebijakan di semua tingkatan dan semua bidang. Teori *water governance* dibentuk untuk menjawab kelemahan dari teori IWRM (*Integrated Water Resources Manajemen*) yang digunakan sebelumnya karena hasil dari implementasinya tidak merata di dalam dan antar negara. Sehingga diperlukan kerangka operasional yang mempertimbangkan kebijakan tata kelola air baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang melalui prinsip-prinsip *water governance*.

1.6.2.2 Prinsip Water Governance

Air menjadi salah satu sektor yang memiliki tantangan tata kelola tersendiri di masa datang. Karena kebijakan yang rumit dan

memiliki keterkaitan dengan bidang-bidang penting pembangunan mencakup bidang kesehatan, lingkungan hidup, pertanian, energi, perencanaan tata ruang, pembangunan daerah, serta pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan OECD pada tahun 2010 menghasilkan bukti bahwa kesenjangan tata kelola mengambat perancangan dan implementasi kebijakan air (OECD, 2015). Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan kebijakan yang adaptif dan berkesinambungan terhadap perubahan.

Merespon adanya tantangan-tantangan dalam tata kelola air, diperlukan adanya kebijakan publik yang kuat, memiliki target tujuan yang terukur, kejelasan distribusi tugas dengan otoritas yang bertanggung jawab, serta pemantuan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Maka dari itu, melalui prinsip-prinsip *water governance* yang dirancang OECD dapat membantu pemerintah di semua tingkatan dalam memperkuat tata kelola air yang sesuai dengan tantangan yang terjadi saat ini atau di masa depan.

Prinsip-prinsip *water governance* OECD terbagi menjadi 3 dimensi dengan antar dimensi tersebut terdapat masing-masing empat prinsip yang saling berkaitan dan melengkapi kerangka kerja tata kelola air agar dapat memperbaiki tata kelola air yang ada agar terwujud *good water governance*.

a. Efektivitas

Dimensi efektivitas berkaitan dengan kontribusi tata kelola untuk menetapkan tujuan dan target dari kebijakan air yang berkelanjutan dan jelas di semua tingkatan pemerintahan. Prinsip-prinsip yang menjadi bagian dari dimensi efektivitas terdiri dari:

- Kejelasan peran dan tanggung jawab
- Ketepatan skala dalam sistem cekungan
- Kebijakan yang koheren
- Kapasitas

b. Efisiensi

Dimensi efisiensi berkaitan dengan kontribusi tata kelola untuk memaksimalkan manfaat pengelolaan air berkelanjutan dan menyejahterakan dengan biaya minimal bagi masyarakat. Prinsip dimensi efisiensi terdiri dari:

- Data dan informasi
- Pembiayaan
- Peraturan kerangka kerja
- Pemerintahan yang inovatif

c. Kepercayaan dan Keterlibatan

Dimensi kepercayaan dan keterlibatan berkaitan dengan kontribusi tata kelola dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan inklusivitas pemangku kepentingan melalui

legitimasi demokratis dan keadilan bagi masyarakat luas. Dimensi kepercayaan dan keterlibatan terdiri dari prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Integritas dan transparansi
- Keterlibatan pemangku kepentingan
- Pertukaran diantara pengguna daerah pedesaan dan daerah perkotaan, serta antar generasi
- Pemanfaatan dan evaluasi

1.6.2 Kelembagaan

Lembaga atau kelembagaan menurut KBBI diartikan sebagai kata yang merujuk pada badan atau organisasi yang ada di masyarakat dan memiliki tujuan tertentu. Bank Dunia mendefinisikan lembaga sebagai aturan, mekanisme penegakan dan organisasi (Azansyah, 2013). Penjabaran definisi kelembagaan selanjutnya memiliki berbagai pandangan yang dipaparkan oleh beberapa ahli. Douglass North merupakan sejarawan ekonomi yang menjabarkan kelembagaan sebagai batasan yang menciptakan pola-pola interaksi diantara individu di berbagai bidang.

“Institutions are the humanly devised constraints that structure political, economic, and social interactions.” (North, 1990:17)

“Lembaga merupakan batasan-batasan yang dirancang secara manusiawi untuk membentuk pola-pola interaksi dalam politik, ekonomi, dan sosial”

Kelembagaan juga dipandang sebagai regulasi dalam keteraturan perilaku sosial yang disepakati dan berlaku di masyarakat, seperti yang dijabarkan oleh Andrew Schotter.

“A regularity in social behavior that is agreed to by all members of society, specifies behavior in specific recurrent situations, and is either self-policed or policed by some external authority.”
(Schotter, 1981:82)

“Keteraturan dalam perilaku sosial yang disetujui oleh semua anggota masyarakat, perilaku spesifik dalam situasi tertentu yang berulang, dan dapat diatur sendiri atau diawasi oleh otoritas eksternal”.

Lebih lanjut Elinor Ostrom dalam (Syarif, 2013) menjabarkan kelembagaan sebagai sebuah aturan yang berlaku di masyarakat dalam menentukan siapa yang berhak membuat keputusan, tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa yang berlaku umum di masyarakat, prosedur yang harus diikuti, informasi yang boleh dan tidak boleh disediakan, serta konsekuensi atas tindakan yang dilakukan.

Secara lebih singkat kelembagaan dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang disepakati, memiliki sanksi, dan harus dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan keteraturan dan keharmonisan interaksi dalam bentuk kegiatan ekonomi, sosial, dan politik diantara anggota masyarakat.

Seiring berjalannya waktu institusi atau kelembagaan akan mengalami perkembangan yang mengikuti dan menyesuaikan perubahan yang berlangsung di masyarakat. Pada perubahan kelembagaan tersebut terdapat *output* yang selanjutnya disebut dengan kinerja kelembagaan

sebagai bentuk hasil dari pemanfaatan sumber daya secara efisien yang dimiliki oleh institusi. Untuk bisa melihat kinerja suatu institusi dapat dilakukan dengan memahami kelembagaan secara internal dan eksternal, yang mana terdapat empat dimensi yang bisa digunakan dalam mempelajari suatu kelembagaan yang disebut dengan *institutional assessment* karya (Lusthaus, et al., 1995:10), yaitu:

1. *The External Environment* (Kondisi Lingkungan Eksternal)

Lingkungan eksternal atau lingkungan sosial yang berada di luar organisasi merupakan faktor yang bisa menjadi pendorong dan pembatas suatu kelembagaan bekerja, seperti:

- Administratif
- Teknologi
- Politik
- Ekonomi
- sosial dan budaya
- Kelompok kepentingan.

2. *Institutional Motivation* (Motivasi Kelembagaan)

Motivasi suatu lembaga dapat diketahui berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Sejarah
- Misi
- Budaya yang menjadi dasar dalam bersikap dan berperilaku
- Pola penghargaan yang dianut

3. *Institutional Capacity* (Kapasitas Kelembagaan)

Mengukur kapasitas kelembagaan dalam upayanya untuk mencapai cita-cita atau tujuan lembaga dapat dilihat dari:

- Strategi kepemimpinan
- Rencana program
- Manajemen dan pelaksanaan
- Alokasi sumberdaya yang dimiliki
- Hubungannya dengan pihak luar

4. *Institutional Performance* (Kinerja Kelembagaan)

Bagaimana kinerja suatu kelembagaan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

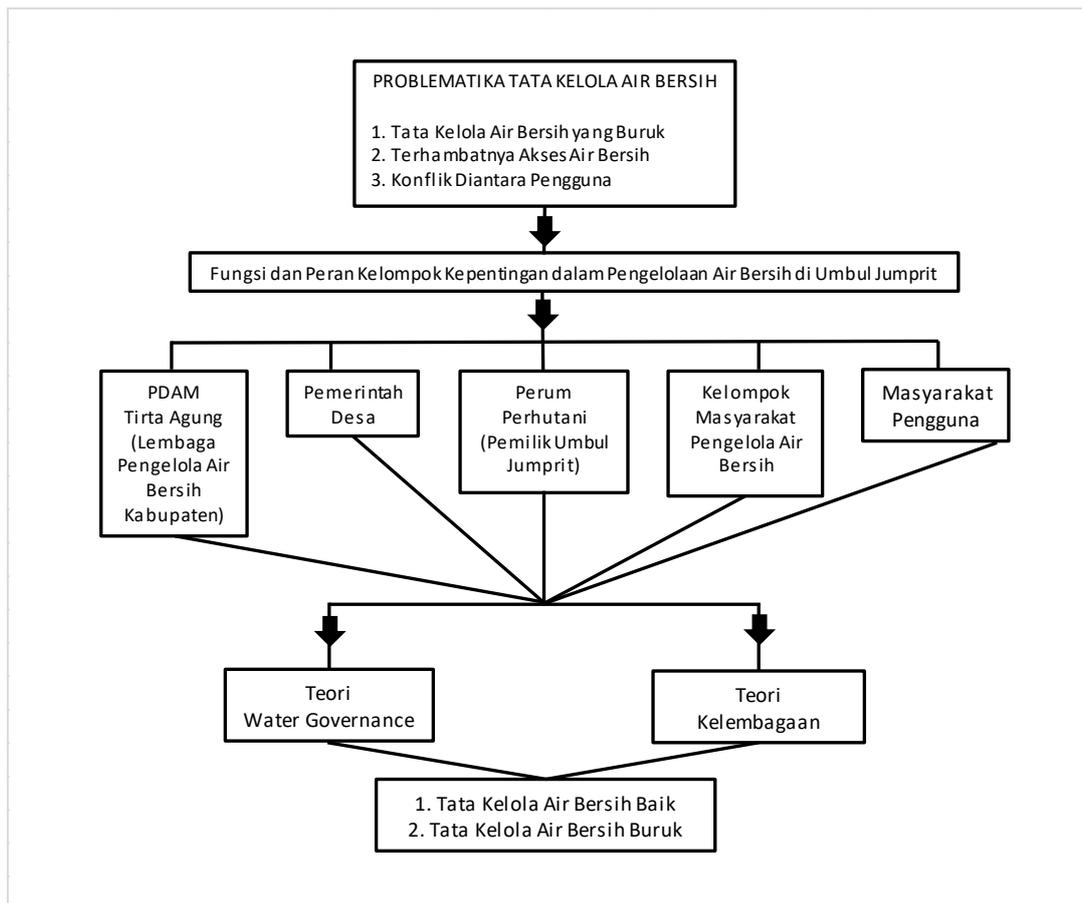
- Kefektifan kelembagaan dalam mencapai tujuan-tujuan
- Efisiensi penggunaan sumber daya
- Keberlanjutan kelembagaan dalam menjalin interaksi dengan kelompok kepentingan di luar kelembagaan

1.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada peneliti dalam melakukan sebuah penelitian hingga mencapai tujuan dan merumuskan kesimpulan yang sesuai. Dalam penelitian ini yang berjudul “Problematika Tata Kelola Air di Umbul Jumprit Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024” bertujuan untuk memberikan analisis bagaimana problematika tata kelola air yang terjadi di Umbul Jumprit terutama pengelolaan air bersih di desa-desa yang memanfaatkan sumber mata

air Umbul Jumprit dengan menggunakan teori *water governance* dan teori kelembagaan untuk mengetahui bagaimana hubungan diantara *stakeholder* dalam melaksanakan fungsinya untuk mengatasi problematika tata kelola air tersebut.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



1.8 Definisi Konsep Dan Operasional

1.8.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana problematika dalam pengelolaan sumber mata air, yaitu Mata Air Umbul Jumprit yang terletak di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung

dikelola untuk bisa digunakan sebagai sumber air baku dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan, dapat ditemukan definisi konseptual sebagai berikut:

- a. *Water governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan pada adanya kerjasama atau kolaborasi diantara *stakeholder* dalam perancangan dan implementasi kebijakan tata kelola air. Menurut konsep *water governance* adanya partisipasi aktif diantara *stakeholder* dapat mendukung terwujudnya *good water governance*.
- b. Kelembagaan merupakan seperangkat peraturan yang disepakati, memiliki sanksi, dan harus dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertaturan dan keharmonisan interaksi dalam bentuk kegiatan ekonomi, sosial, dan politik diantara anggota masyarakat.

1.8.2 Definisi Operasional

Penelitian ini menjabarkan pengelolaan Mata Air Umbul Jumprit yang dimanfaatkan masyarakat dengan menggunakan 12 prinsip *water governance* OECD yang dielaborasi dengan konsep *Institutional Assessment* dari teori kelembagaan Charles Lusthaus, lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.0.3
Operasionalisasi Konsep

Teori	Konsep	Indikator	Sub-Indikator
<i>Water Governance</i> OECD (OECD,	Prinsip-prinsip <i>Water Governance</i>	Efektivitas: Kontribusi dari tata kelola yang	1. Kejelasan peran dan tanggung jawab.

Teori	Konsep	Indikator	Sub-Indikator
2015)	OECD	memiliki target dan tujuan atas kebijakan air berkelanjutan yang jelas di semua tingkatan pemerintahan.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kebijakan yang koheren. 3. Kapasitas.
		Efisiensi: Kontribusi tata kelola untuk memaksimalkan manfaat dari pengelolaan air berkelanjutan, serta kesejahteraan dengan meminimalkan biaya bagi masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi. 2. Pembiayaan. 3. Peraturan kerangka kerja.
		Kepercayaan dan Keterlibatan: Kontribusi tata kelol dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan inklusivitas pemangku kepentingan melalui legitimasi demokratis dan keadilan bagi masyarakat luas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi. 2. Keterlibatan pemangku kepentingan. 3. Pertukaran diantara pengguna daerah pedesaan dan perkotaan, serta antar generasi.

Teori	Konsep	Indikator	Sub-Indikator
Kelembagaan	<i>Institutional Assessment</i> (Lusthaus, <i>et al.</i> , 1995:10)	<i>The External Environment</i> (Kondisi Lingkungan Eksternal) Kondisi lingkungan eksternal kelembagaan menjadi salah satu faktor yang bisa berdampak positif dan negatif dalam bekerjanya lembaga.	1. Kepuasan konsumen. 2. Respon pengelola terhadap keluhan konsumen. 3. Pemanfaatan teknologi.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif untuk menjelaskan atau menganalisis fenomena yang diteliti secara lebih mendalam dengan melakukan interpretasi pada data yang telah diperoleh. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berusaha mengukur hubungan antara variabel atas fenomena yang terjadi, maka penelitian kualitatif digunakan untuk penelitian yang belum diketahui variabel-variabelnya dan perlu dilakukan eksplorasi lebih lanjut (Creswell, 2015).

1.9.2 Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data yang akan digunakan dalam menemukan jawaban dan solusi atas permasalahan penelitian ini, maka lokasi penelitian dilakukan di desa-desa yang memanfaatkan air bersih dari

Umbul Jumprit. Dari ke sembilan desa diambil 3 desa, yaitu Desa Tegalrejo, Desa Katekan, dan Desa Mangunsari yang berada di Kecamatan Ngadirejo.

1.9.3 Informan Penelitian

Subjek penelitian yang dibutuhkan dalam menunjang terkumpulnya informasi dan data pada proses penelitian diantaranya Kepala Perum Perhutani BKPH Kedu Utara, Kepala PDAM Tirta Agung Unit Ngadirejo, Kepala Desa Tegalrejo, Kepala Desa Katekan, Kepala Desa Mangunsari, kelompok pengelola air dari 3 desa (Tegalrejo, Katekan, Mangunsari) dan masyarakat dari desa yang memanfaatkan air bersih dari Umbul Jumprit.

1.9.4 Sumber Data

Data pada penelitian kualitatif bisa dalam berbagai bentuk seperti teks, foto, cerita, gambar, *artifacts* dan bukan berupa angka hitung-hitungan (Raco, 2010). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Secara sederhana data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau subjek penelitian. Dalam rangka memperoleh data primer ini biasanya seorang peneliti melakukan wawancara kepada informan yang memenuhi persyaratan dalam mendukung penelitian. Pada penelitian ini data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara dari Kepala Perum Perhutani BKPH Kedu

Temanggung, Kepala PDAM Tirta Agung Unit Ngadirejo, Petugas Perhutani Umbul Jumprit, Kepala Desa Tegalrejo, Kepala Desa Katekan, Kepala Desa Mangunsari, Ketua kelompok pengelola dari masing-masing desa dan perwakilan beberapa masyarakat yang memanfaatkan air bersih dari Umbul Jumprit.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia baik dalam bentuk rekaman, dokumentasi, dokumen, catatan, ataupun penelitian sebelumnya, serta sumber data sekunder lainnya yang relevan dan dapat membantu proses penelitian.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif data diperoleh dalam berbagai cara yang selanjutnya disebut dengan triangulasi, yaitu cara-cara pengumpulan data yang terdiri dari: wawancara, observasi, dan dokumen (Raco, 2010). Teknik pengumpulan data yang demikian pada penelitian kualitatif disebabkan tidak terdapat metode tunggal yang sempurna untuk digunakan. Sehingga peneliti bermaksud menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara, karena proses pengumpulan data tidak hanya sebatas melakukan wawancara kepada informan. Akan tetapi, penelitian kualitatif menekankan pada keterlibatan langsung peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan.

Usaha peneliti untuk memperoleh data yang mendalam bisa diperoleh salah satunya dengan menggunakan teknik observasi. Melalui

observasi ini maka peneliti bisa mengamati secara langsung bagaimana sikap, perilaku, dan tindakan informan. Selain itu, teknik observasi juga sangat dibutuhkan dalam penelitian ini untuk mengamati bagaimana interaksi atau hubungan diantara organisasi dan pihak-pihak terkait dalam mengelola mata air Umbul Jumprit. Meskipun demikian teknik observasi tidak secara sempurna memenuhi kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian karena tidak semua informasi bisa diperoleh dari observasi. Sehingga pengumpulan data didukung wawancara dengan mengajukan pertanyaan atas hal-hal yang tidak diperoleh peneliti pada saat observasi kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dipahami sebagai proses mengubah data yang diperoleh di lapangan menjadi sebuah temuan. Menurut (Raco, 2010) analisis data memiliki pengertian mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Pada praktiknya pengumpulan data dan analisis data merupakan dua kegiatan yang berjalan secara serempak. Artinya, kegiatan menganalisis data tidak hanya dilakukan setelah semua data terkumpul, namun juga dilakukan ketika kegiatan mengumpulkan data dengan menyeleksi mana yang penting atau tidak (Gunawan, 2013:209-212). Sejalan dengan hal tersebut Miles & Huberman menegaskan bahwa data dalam penelitian kualitatif harus diproses dan dianalisis sebelum digunakan, karena data

yang terkumpul dalam penelitian kualitatif menggunakan berbagai teknik, seperti wawancara, observasi, dokumen dan lain sebagainya (Yusuf, 2014:407-409).

Model analisis data Miles & Huberman menggunakan model alir yang terdiri dari tiga kegiatan analisis yang dilakukan secara serempak, yaitu: reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasan lebih lanjut kegiatan teknik analisis data menurut Miles & Huberman.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan yang merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Sehingga dikatakan bahwa kegiatan mereduksi data juga menjadi bagian dari kegiatan menganalisis dengan mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data hingga diperoleh gambaran kesimpulan.

2. Data Display

Data display merupakan kumpulan informasi-informasi yang tersusun dan mudah dipahami. Pada penelitian kualitatif data display disajikan dalam bentuk teks analisis naratif atas penjabaran dari data yang diperoleh selama penelitian.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Pada model analisis data Miles dan Huberman penarikan kesimpulan sudah dilakukan sejak awal pengumpulan data dalam bentuk catatan-catatan yang diperoleh dari kegiatan reduksi data. Meskipun demikian tidak serta merta kesimpulan awal dapat langsung digunakan, karena memerlukan verifikasi untuk memperkuat kesimpulan yang telah diperoleh hingga menjadi kesimpulan akhir.